

Laporan Tahunan Dewan Eksekutif BAN-PT Tahun 2017



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel.....	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
I. Pendahuluan.....	6
II. Ringkasan Capaian Tahun 2017	7
III. Rencana Kegiatan 2017	9
IV. Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian	12
A. Akreditasi (APT, APS, prodi baru)	12
1. Usulan akreditasi.....	12
2. Pelaksanaan Proses Asesmen.....	13
3. Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi	15
4. Efisiensi Pelaksanaan Akreditasi.....	16
5. Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi	19
B. Pengembangan Asesor	21
1. Updating database asesor	21
2. Evaluasi kinerja asesor	22
3. Pelatihan dan penyegaran asesor;.....	24
4. Pengembangan Modul Aplikasi Penugasan Asesor.	25
C. Studi Hasil Akreditasi dan Kepuasan Pengguna.....	25
1. Studi Hasil Akreditasi	26
2. Studi Kepuasan Masyarakat	27
D. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan.....	31
1. Perpanjangan MoU dengan Beberapa Mitra Internasional.....	31
2. Pelaksanaan ASEAN QAA Conference	31
3. Pelaksanaan External Review.....	32
4. Keterlibatan dalam organisasi internasional	33
E. Pengembangan Sistem IT	34
1. Infrastruktur dan Jaringan.....	34

2. Sistem Aplikasi	34
3. Sistem Informasi Akreditasi	0
F. Peningkatan Kapasitas Sekretariat.....	1
V. Kendala dan Solusi/Strategi	2
Lampiran.....	5

Daftar Gambar

Gambar IV-1. Perbandingan Rata-Rata Waktu (hari) Penyelesaian Akreditasi.....	17
Gambar IV-2. Perbandingan Lama (dalam hari) Proses Akreditasi	18
Gambar IV-3. Rasio program studi dan asesor	22

Daftar Tabel

Tabel II-1. Indikator Kinerja Dewan Eksekutif BANPT 2017.....	7
Tabel III-1. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2017	9
Tabel IV-1. Jumlah usulan APS dan APT yang diterima BAN-PT pada bulan Januari sampai dengan Desember 2017	13
Tabel IV-2. Pelaksanaan AK dan AL atas usulan Akreditasi PSTahun 2017	14
Tabel IV-3. Pelaksanaan AK, AL, danSK yang terpit pada proses Akreditasi PT selama tahun 2017	15
Tabel IV-4. Validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi baru tahun 2017.....	16
Tabel IV-5. Sebaran peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan kelompok PT pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017	20
Tabel IV-6. Sebaran peringkat terakreditasi Program Studi berdasarkan kelompok PT (per 1 Desember 2017).....	20
Tabel IV-7. Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia	21
Tabel IV-8. Jumlah Program Studi di Indonesia.....	21
Tabel IV-9. Rekapitulasi penilaian responden akreditasi program studi.....	23
Tabel IV-10. Rekapitulasi penilaian responden akreditasi institusi.....	23
Tabel IV-11. Tingkat kepuasan per aspek untuk responden program studi	30
Tabel IV-12. Tingkat kepuasan per aspek untuk responden perguruan tinggi	30
Tabel IV-13. Perwakilan stakeholders BAN-PT dalam kegiatan External Review ...	33
Tabel IV-14. Pelaksanaan pelatihan SAPTO bagi pengguna perguruan tinggi	36
Tabel IV-15. Data Pengguna SAPTO.....	0

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1; Daftar Asesor yang lolos seleksi tahun 2017.....	5
Lampiran 2; Laporan Studi Hasil Akreditasi	5
Lampiran 3. Laporan hasil studi kepuasan stakeholders akreditasi BAN-PT . Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 4. Dokumen laporan panel pelaksanaan <i>external review</i> BAN-PT	5

I. Pendahuluan

Sesuai ketentuan Pasal 21 huruf *i* Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, Dewan Eksekutif menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi. Selanjutnya sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) huruf *h* angka 1 Peraturan BANPT No 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakelola BANPT, bahwa Dewan Eksekutif menyusun laporan tahunan kegiatan akreditasi Perguruan Tinggi untuk disampaikan kepada MA. Dokumen ini memuat laporan tahun 2017.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BANPT Tahun 2017 yang telah disetujui oleh Majelis Akreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Laporan disusun mengikuti alur pikir sebagai berikut: Laporan dimulai dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama Dewan Eksekutif BAN-PT sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, diikuti dengan rencana kegiatan tahun 2017 sebagaimana telah dimuat dalam RKAT BANPT tahun 2017. Selanjutnya disampaikan analisa pelaksanaan kegiatan khususnya terkait dengan kendala yang dihadapi serta upaya dan penyelesaian yang telah dilakukan.

Selain sebagai wujud akuntabilitas internal, laporan ini juga disusun sebagai bagian dari upaya evaluasi diri Dewan Eksekutif yang merupakan elemen vital dalam proses penjaminan mutu secara berkelanjutan. Diharapkan laporan ini akan mendapat response yang konstruktif dari Majelis Akreditasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan BAN-PT untuk stakeholder.

II. Ringkasan Capaian Tahun 2017

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Permenristekdikti No 32/2016, tugas utama Dewan Eksekutif adalah melaksanakan proses akreditasi perguruan tinggi (dan program studi – dalam hal LAM terkait dengan program studi dimaksud belum terbentuk). Dalam menjalankan tugas dimaksud serta mengacu pada Rencana Strategis BANPT 2017 - 2022, secara keseluruhan, ukuran kinerja DE dapat dinyatakan dengan indikator sebagaimana diperlihatkan **Error! Reference source not found.**

Tabel II-1. Indikator Kinerja Dewan Eksekutif BANPT 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Capaian 31 Des 2017
1	Jumlah APT diproses	PT	4.000	473
2	Jumlah APS diproses	PS		3850
3	Jumlah SK/Sertifikat APT	SK	4.000	480
4	Jumlah SK/Sertifikat APS	SK		3233
5	Jumlah SK Prodi Baru	SK	350	359
6	Rata-rata waktu proses APT			
	a. Konvensional	Hari	120	157
	b. SAPTO	Hari	90	86
7	Rata-rata waktu proses APS			
	a. Konvensional	Hari	120	190
	b. SAPTO	Hari	90	76
8	Pengakuan Internasional	Assessment	1	1

Pada awalnya, direncanakan total target akreditasi sebanyak 4.000, yang terdiri dari 1000 APT dan 3000 APS. Namun hingga akhir tahun 2017 BANPT hanya menerima 473 usulan APT dan kesemuanya dapat diselesaikan. Sementara itu, terjadi lonjakan jumlah usulan APS khususnya saat terjadi peralihan dari system konvensional (hard copy) menjadi sistem online (SAPTO). Secara umum, tugas utama DE dalam melaksanakan proses akreditasi dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan, secara akumulatif jumlah PS dan PT yang diakreditasi (4323 PS/PT) melebihi target capaian yang direncanakan (4000PS/PT). SK akreditasi yang dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2017 masih di bawah target. Perlu diketahui bahwa jumlah SK yang dikeluarkan tahun 2017 termasuk sejumlah SK yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, BANPT menunda penerbitan SK jika terdapat masalah seperti jumlah dosen tetap kurang dari standar, nama program studi atau perguruan tinggi tidak sesuai dengan nama yang terdaftar di PDDikti, dan lain sebagainya. Hal ini juga telah menyebabkan belum semua usulan yang telah selesai diproses telah diterbitkan SK.

Tabel II-1 juga mencatat bahwa waktu rerata yang diperlukan untuk proses akreditasi konvensional (157 hari untuk APT dan 190 hari untuk APS) masih di atas target yaitu 120 hari. Penyebab utama dari lamanyawaktu proses ini adalah tingginya jumlah usulan pada akhir Maret 2017 menjelang diterapkannya berlakukannya SAPTO. Di sisi lain proses akreditasi APT dan APS menggunakan system online SAPTO dapat dilakukan secara lebih cepat (dengan rerata 86 hari untuk APT dan 76 hari untuk APS).

Pada tahun 2017 didukung oleh proyek EU-SHARE, BAN-PT juga telah direview oleh ENQA untuk menguji keselarasan kelembagaan dan proses akreditasi yang diselenggarakan BANPT dengan kerangka penjaminan mutu ASEAN atau (ASEAN Quality Assurance Framework – AQAF). Hasil review menunjukkan bahwa BANPT telah memenuhi 10 prinsip AQAF untuk sebuah Lembaga akreditasi, dan 10 prinsip AQAF tentang penyelenggaraan proses akreditasi.

III. Rencana Kegiatan 2017

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAN-PT tahun 2017 disusun berdasarkan Renstra tahun 2017-2021, dengan target kinerja yang meliputi: Jumlah Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi yang diakreditasi; pendirian, supervisi dan pemantauan LAM; fungsionalitas e-akreditasi, asesor tersertifikasi (terlatih), dan instrumen Akreditasi, serta diperolehnya pengakuan internasional terhadap BAN-PT. Ringkasan Rencana Kegiatan BAN-PT tahun 2017 dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

Tabel III-1. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2017

NO	Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen	VolumeSub output	
		Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	AKREDITASI PROGRAM STUDI		
A.	Pengolahan Data Akreditasi Program Studi	3,000	PS
E.	Re - Validasi	2,898	PS
F.	Surveillance	100	PS
II	AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI		
A.	Pengolahan Data Akreditasi Institusi	1,000	PT
E.	Surveillance	80	PT
F.	Akreditasi Pendirian Prodi/Institusi Baru	1,000	PT
III	DOKUMEN PENETAPAN KEBIJAKAN	1	DOK
A.	Dokumen Kebijakan Majelis Akreditasi	24	Keg
B.	Dokumen Kebijakan Dewan Eksekutif	48	Keg
IV	PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA		
A.	Pengembangan Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	3	Keg
B.	Lokakarya Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	1	Dok
C.	Studi kepuasan stakeholders (Termasuk Didalamnya Kinerja Asesor)	1	Keg
D.	Rekomendasi Hasil Akreditasi	1	Dok
V	PERANGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI		
A.	Uji Coba Perangkat Akreditasi	60	PT
B.	Studi Banding Pengembangan Perangkat Akreditasi	5	Neg
C.	Penyempurnaan Perangkat Akreditasi	1	Dok
D.	Pendirian LAM	3	Keg
E.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja LAM	3	Keg
VI	PENINGKATAN KAPASITAS SDM AKREDITASI PT		
A.	Rekrutmen Asesor	100	Org

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen	VolumeSub output	
		Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
VII	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM AKREDITASI PT		
	B. Pelatihan Asesor Akreditasi PT	200	Org
	C. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu/Akreditasi PT	12	Keg
	D. Pelatihan Tenaga Teknis Sekretariat BAN PT dan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Penerapan Sistem Akreditasi Online	2	Keg
	A. Pengembangan Sistem Akreditasi Online (14 Modul)	3	Keg
VIII	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI		
	A. Publikasi Hasil Akreditasi berbasis Media	1	Dok
	B. Penyusunan Direktori Profil Hasil Akreditasi		
IX	MANAJEMEN AKREDITASI PT		
	A. Pengelolaan Program Akreditasi	12	Bln
	B. Layanan Operasional BAN-PT	12	Bln
	C. Koordinasi Pelaksanaan Tata Kelola Akreditasi	6	Keg
	D. Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran	5	Keg
	E. Penyusunan Laporan Program dan Keuangan	10	Keg
	- Penyusunan Laporan Program		
	- Penyusunan Laporan Keuangan		
	F. Pengadaan Peralatan Kantor	1	Pkt

Dalam perspektif aktivitas yang diturunkan dari Rencana Kegiatan Tahunan BAN-PT di atas, kegiatan Dewan Eksekutif BAN-PT – yang meliputi kegiatan rutin dan pengembangan. Kegiatan DE dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu:

- 1) **Pelaksanaan akreditasi:** yang meliputi akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi, dan akreditasi minimum untuk pendirian perguruan tinggi baru atau pembukaan program studi baru. Bagian ini dikoordinasikan atau di bawah tanggungjawab Prof. S.M Widyastuti.
- 2) **Pengembangan dan Kerjasama:** yang meliputi pengelolaan dan pengembangan instrument, asesor, dan kerjasama. Kegiatan ini berada dibawah koordinasi Dr. Sugiyono.
- 3) **Pengelolaan dan pengembangan data dan informasi akreditasi.** Kegiatan ini mencakup tiga komponen besar yaitu, infrastruktur, system aplikasi, dan system informasi. Kegiatan ini, hingga akhir September 2017 dikoordinir oleh Dr. Fauzri Fahimuddin. Saat ini kegiatan ini berada di bawah koordinasi Prof. Akhmad Fauzy.
- 4) Kegiatan lainnya seperti administrasi dan manajemen secretariat, pelayanan publik seperti legalisasi sertifikat dan surat keterangan, kegiatan pleno

mingguan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi LAM, dan kegiatan adhoc seperti workshop, rapat koordinasi dan lain-lain. Kegiatan ini di bawah koordinasi Dr. Agus Setiabudi selaku Sekretaris DE.

Selanjutnya, pada Bab berikut akan dijelaskan pelaksanaan kegiatan DE dan capaian pada Tahun 2017 sesuai kelompok bidang sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

IV. Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian

A. Akreditasi (APT, APS, prodi baru)

Pada awal tahun 2017 proses akreditasi mengalami masa transisi menuju proses akreditasi online. Setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Akreditasi, Dewan Eksekutif memulai proses transisi dengan menetapkan batas akhir pemasukan usulan akreditasi berupa dokumen hardcopy (konvensional) yaitu tanggal 31 Maret untuk APS dan 31 Mei untuk APT. Setelah tanggal tersebut, BAN-PT hanya menerima usulan akreditasi secara online melalui sistem aplikasi SAPTO. Sejak April 2017, proses akreditasi dilakukan secara dua moda, yaitu konvensional dan online.

1. Usulan akreditasi

Dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran, pada akhir tahun 2016 terdapat 936 usulan APS yang belum diproses dan 136 usulan APS yang sudah dilakukan proses AK namun belum ditindaklanjuti dengan AL. Pekerjaan yang belum selesai tersebut diluncurkan ke tahun 2017 untuk diselesaikan. Bersama dengan limpahan dari tahun 2016, hingga batas akhir waktu pemasukan usulan akreditasi secara konvensional yaitu 31 Maret untuk APS dan 31 Mei untuk APT, BAN-PT menerima usulan secara konvensional sebanyak 3.159 APS dan 437 APT.

Lonjakan jumlah usulan APS terjadi pada tanggal 29, 30, dan 31 Maret 2017 telah menyebabkan banyaknya usulan yang tidak terdata dengan baik. Hal ini menjadi lebih rumit dikarenakan, selain menerima usulan yang disampaikan secara langsung, BANPT juga membolehkan perguruan tinggi untuk mengirimkan dokumen melalui layanan Pos dengan catatan bahwa dokumen telah dikirim sebelum tanggal 31 Maret yang dibuktikan dengan cap pos. Jumlah usulan yang sangat besar pada waktu hampir bersamaan tentu saja akan mempersulit penjadwalan proses dan mengakibatkan banyaknya usulan yang tidak diproses untuk jangka waktu yang cukup lama. Hingga pertengahan tahun 2017 proses pendataan usulan akreditasi konvensional masih belum dapat diselesaikan. Akan tetapi padaakhir bulan November, seluruh usulan APS yang terdata dan memenuhi syarat untuk diakreditasi telah selesai diproses dengan dilaksanakannya AK-PS tahap 15.

Sementara itu, penerimaan usulan APS secara online juga telah dibuka sejak tanggal 10 April 2017. Hingga akhir Juni 2017, tercatat 46 usulan akreditasi APS dan 1 akreditasi APT yang diterima pada SAPTO. Jumlah ini berkembang hingga mencapai 888 usulan APS dan 63 usulan APT pada akhir Desember 2017.

Rincian usulan akreditasi yang diterima BANPT hingga 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel IV-1.

Tabel IV-1. Jumlah usulan APS dan APT yang diterima BAN-PT pada bulan Januari sampai dengan Desember 2017

No.	Bulan	APS		APT	
		Konvensional	SAPTO	Konvensional	SAPTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Carry over</i> tahun 2016	936	0	37	0
2.	Januari	183	0	20	0
3.	Februari	243	0	15	0
4.	Maret	1.797	0	18	0
5.	April	0	7	28	0
6.	Mei	0	25	319	1
7.	Juni	0	71	0	3
8.	Juli	0	142	0	3
9.	Agustus	0	151	0	12
10.	September	0	98	0	4
11.	Oktober	0	188	0	13
12.	November	0	159	0	14
13.	Desember	0	47	0	13
Jumlah		3.159	888	437	63

Usulan APT melalui SAPTO dimulai sejak tanggal 1 Juni 2017, namun sudah ada 1 usulan yang disampaikan bulan Mei.

2. Pelaksanaan Proses Asesmen

Hasil Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL) terhadap APS yang diterima BAN-PT dilaksanakan menggunakan metode konvensional dan SAPTO sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 diperlihatkan pada Tabel IV-2. SK yang diterbitkan setiap bulan, juga disertakan pada Tabel tersebut.

Perlu dicatat bahwa jumlah usulan akreditasi PS yang dapat diproses pada beberapa bulan tertentu lebih rendah dibandingkan bulan lainnya, hal ini dikarenakan pada bulan yang sama dilakukan proses AK untuk APT. Namun khusus untuk bulan Mei

2017 penurunan jumlah AK APS dikarenakan adanya kendala keuangan yang dialami BANPT sebagai dampak dari hasil audit keuangan yang menyebabkan adanya perubahan pola pengelolaan keuangan secara signifikan .

Tabel IV-2. Pelaksanaan AK dan AL atas usulan Akreditasi PSTahun 2017

No.	Bulan	AK		AL		SK	
		Konv.	SAPTO	Konv.	SAPTO	Konv.	SAPTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Januari			136		473	
2	Februari	400		88		47	
3	Maret	220		501		235	
4	April	660		300		243	
5	Mei	220	1	563		300	
6	Juni	220	4	227	1	326	
7	Juli	440	26	190	16	217	6
8	Agustus	220	63	387	53	460	54
9	September	440	45	248	56	187	59
10	Oktober	185	49	359	36	386	26
11	November	210	110	228	102	193	86
12	Desember		134	43	177	470	214
Jumlah		3.215	443	3.270	441	3.537	445

Selanjutnya hasil Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan(AL) untuk APT yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017 disajikan pada **Error! Reference source not found.** Jumlah usulan akreditasi perguruan tinggi (APT) agak jauh di bawah perencanaan 2017. Dengan dikeluarkannya Permenristekdikti no 32 Tahun 2016 yang mewajibkan semua perguruan tinggi yang didirikan sebelum Agustus 2012 sudah terakreditasi pada bulan Mei 2018 tidak terlalu berpengaruh. Dikhawatirkan lonjakan usulan APT akan terjadi pada tahun 2018.

Proses akreditasi APT melibatkan 2 sampai dengan 7 asesor per institusi. Hal ini menyebabkan biaya satuan dan waktu proses untuk APT relative lebih tinggi dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk proses APS. Di samping itu, jumlah asesor yang dapat ditugaskan untuk melakukan penilaian usulan APT juga relative lebih sedikit, karena dibutuhkan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini tentu saja akan menjadi persoalan jika terjadi lonjakan jumlah usulan APT secara mendadak.

Tabel IV-3. Pelaksanaan AK, AL, danSK yang terpit pada proses Akreditasi PT selama tahun 2017

No.	Bulan	AK		AL		SK	
		Konv.	SAPTO	Konv.	SAPTO	Konv.	SAPTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Januari					22	
2	Februari					2	
3	Maret	70		51		0	
4	April			15		0	
5	Mei			67		61	
6	Juni	70		91		2	
7	Juli		1	171		3	
8	Agustus	188	2	26	3	65	2
9	September	109		51		91	1
10	Oktober		2	15		145	
11	November		5		3	58	3
12	Desember		13		17	4	17
Jumlah		437	23	421	23	453	23

3. Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi

Sesuai ketentuan peraturan perundangan, pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi baru oleh otoritas yang berwenang harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi. BANPT telah menerima usulan untuk verifikasi persyaratan minimum akreditasi terkait pembukaan program studi baru dari Kementerian Ristekdikti dan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Hingga akhir Desember 2017 BANPT telah menerima 585 usulan dari Kemristekdikti dan 21 usulan dari PTN-BH. Hingga laporan ini ditulis, belum ada usulan yang terkait dengan pendirian perguruan tinggi baru. Distribusi proses validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi baru disajikan pada Tabel IV-4.

Dari 606 usulan yang divalidasi (585 usulan dari Kemristekdikti dan 21 usulan dari PTN-BH); 523 usulan disetujui untuk diterbitkan SK Akreditasi minimumnya dan 83 usulan dikembalikan karena hasil penilaian belum lengkap atau terjadi split antar kedua penilai.

Tabel IV-4. Validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi baru tahun 2017

No	Bulan	D-III	D-IV	Profesi	S1	S2	S3	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Januari			1	22	8	2	33
2	Februari	3	6		105	32	2	148
3	Maret		1					1
4	April		2	1	38	7		48
5	Mei	3	5		82	23		113
6	Juni	1			16	3	1	21
7	Juli	1	1		3	7	4	16
8	Agustus	1	4		23	5		33
9	September							0
10	Oktober	4	6	3	58	5		76
11	November	1	2		10			13
12	Desember	1		1	6	1	12	21
	Jumlah	18	27	5	335	82	16	523

Dari 606 usulan yang divalidasi (585 usulan dari Kemristekdikti dan 21 usulan dari PTN-BH); 523 usulan disetujui untuk diterbitkan SK Akreditasi minimumnya dan 83 usulan dikembalikan karena hasil penilaian belum lengkap atau belum dapat divalidasi dikarenakan laporan reviewer yang mengindikasikan bahwa usulan belum memenuhi standar minimum.

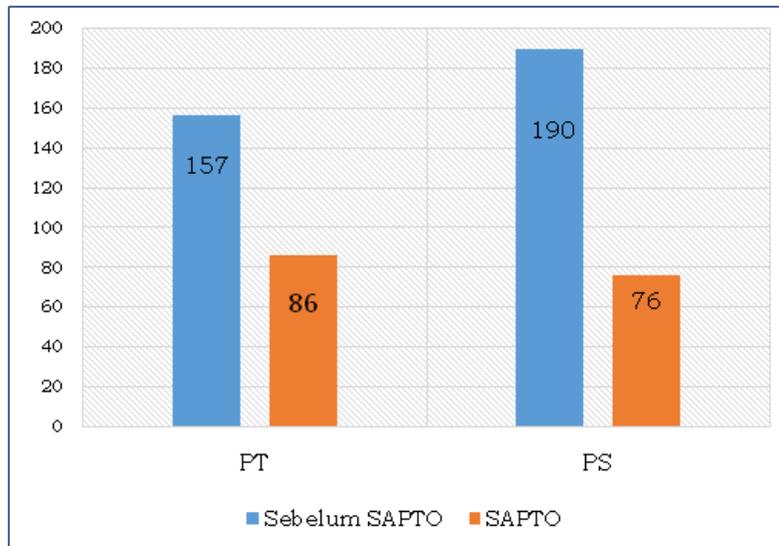
Perlu dicatat bahwa usulan yang dikembalikan umumnya disebabkan karena belum dilakukan pengecekan oleh pihak Kemenristekdikti atas laporan reviewer sehingga masih terjadi kasus split menyangkut penilaian atas aspek legalitas dan kecukupan sumber daya.

4. Efisiensi Pelaksanaan Akreditasi

Salah satu tujuan digunakannya system SAPTO adalah untuk meningkatkan efisiensi proses akreditasi yang antara lain ditandai dengan penurunan waktu proses dan penurunan biaya satuan. Untuk mengukur tingkat efisiensi yang telah dicapai, telah dilakukan pengukuran rata-rata waktu proses dan rata-rata biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproses suatu usulan akreditasi baik APT maupun APS.

Dari sampel sebanyak 1829 borang APS dengan menggunakan proses konvensional sebelum SAPTO tahun 2017, diperlukan rata-rata waktu proses akreditasi 189,9 hari. Sedangkan dari sampel sebanyak 444 borang APS yang diproses dengan SAPTO diperlukan rata-rata waktu 75,8 hari. Angka ini jelas menunjukkan adanya penurunan waktu proses yang cukup signifikan.

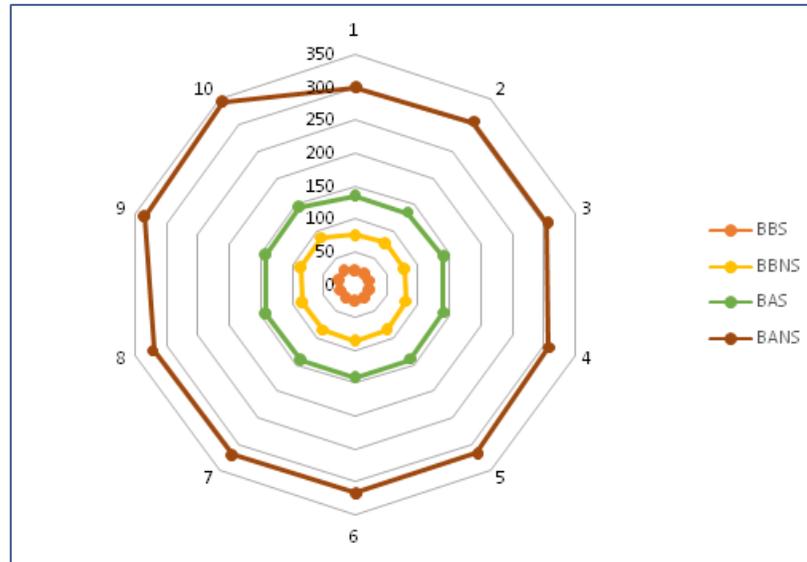
Untuk akreditasi PT sebelum SAPTO dengan sampel 70 PT, diperoleh rata-rata waktu proses 149,82 hari, sedangkan dengan sampel 23 PT menggunakan SAPTO, diperoleh rata-rata waktu 86,40 hari. Jika dibandingkan rata-rata lamanya proses akreditasi PS dan PT antara sistem sebelum SAPTO dan SAPTO dapat dilihat dalam Gambar IV-1. Perbandingan Rata-Rata Waktu (hari) Penyelesaian Akreditasi.



Gambar IV-1. Perbandingan Rata-Rata Waktu (hari) Penyelesaian Akreditasi

Dari Gambar IV-1 terlihat bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk proses akreditasi PS dengan sistem pengajuan borang (sebelum SAPTO) sebanyak 190 hari atau 6 bulan 10 hari, sedangkan dengan sistem SAPTO 76 hari 2 bulan 16 hari. Tingkat efisiensinya lebih dari 50 persen. Sementara itu untuk PT yang sebelum SAPTO rata-rata prosesnya 157 hari atau 5 bulan 7 hari sedangkan dengan SAPTO 86 hari atau 2 bulan 26 hari.

Jika dari data sampel di atas akan dibandingkan kembali lamanya proses akreditasi dari 10 data tercepat dan terlambat sebelum SAPTO dan SAPTO, maka diperoleh diagram seperti diperlihatkan pada **Error! Reference source not found.**



Gambar IV-2. Perbandingan Lama (dalam hari) Proses Akreditasi

Keterangan:

BBNS = batas bawah sebelum SAPTO

BANS = batas atas sebelum SAPTO

BBS = batas bawah SAPTO

BAS = batas atas SAPTO

Dari Gambar IV-1 terlihat bahwa lamanya proses yang paling lambat dengan SAPTO, masih lebih cepat jika dibandingkan dengan yang sebelum SAPTO. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SAPTO lebih pendek waktu pengurusannya daripada sebelum SAPTO.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa terjadi penumpukan usulan APS pada akhir Maret 2017 dan adanya hambatan proses keuangan di sekitar bulan April dan Mei 2017. Akan tetapi, jika digunakan rata-rata waktu proses tahun 2016, yaitu 186 hari untuk APT dan 127 hari untuk APS, yang secara konsisten menunjukkan adanya penurunan waktu proses yang signifikan.

Penurunan waktu proses secara signifikan terjadi disebabkan beberapa factor berikut:

- a. Proses AK di SAPTO dapat dilakukan segera setelah suatu usulan lengkap tanpa harus menunggu jumlah usulan tertentu (satu tahap konvensional meliputi 200 – 240 APS atau 70 – 100 APS), sebagaimana yang diterapkan pada system konvensional.
- b. Proses data entry untuk memasukkan laporan AL dan hasil validasi laporan AL tidak diperlukan dalam system SAPTO. Pada system konvensional, laporan AL

dari setiap asesor harus dientry ke dalam system pangkalan data, yang membutuhkan waktu setengah hingga satu jam untuk setiap laporan dari satu asesor. Hal yang sama harus dilakukan pada hasil validasi, yang juga membutuhkan waktu sekitar 15 menit hingga 30 menit per usulan, tergantung pada banyak atau tidaknya perubahan yang harus dilakukan.

- c. Validasi laporan AL di SAPTO dapat dikerjakan segera setelah laporan disubmit di SAPTO tanpa harus menunggu laporan AL yang memenuhi jumlah tertentu (biasanya 400 laporan).

Untuk melihat peningkatan efisiensi dari aspek biaya proses, telah dilakukan perhitungan biaya langsung untuk sampel yang meliputi 3985 APS dan 473 APT. Biaya langsung dalam hal ini meliputi: honor, biaya perjalanan, biaya akomodasi dan konsumsi baik untuk asesor maupun validator. Hasil perhitungan menunjukkan biaya satuan Rp. 35.694.000 / APS dan Rp. 59.263.000 / APT untuk proses konvensional dan Rp. 21.092.000 / APS dan Rp. 36.724.000 / APT untuk proses dengan SAPTO.

Penurunan biaya langsung ini khususnya disebabkan oleh tidak adanya biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi untuk proses AK oleh asesor dan proses validasi oleh validator.

5. Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Hasil akreditasi yang secara akumulatif sampai dengan akhir Desember 2017, untuk perguruan tinggi dan program studi berdasarkan kelompok perguruan tinggi diperlihatkan pada Tabel IV-5 dan Tabel IV-6. Data pada Tabel IV-6 sudah termasuk data akreditasi program studi kesehatan. Data akreditasi program studi ini ditampilkan berdasarkan basis data akreditasi BAN-PT. Tampak bahwa, jumlah program studi terakreditasi tahun 2016 lebih banyak dibandingkan tahun 2017. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada basis data tahun 2016 masih terdapat data program studi yang belum “dibersihkan”.

Tabel IV-5. Sebaran peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan kelompok PT pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017

Kelompok	Akreditasi 2016				Akreditasi 2017			
	A	B	C	Total	A	B	C	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PTN	28	44	8	80	30	45	8	83
PTS	15	231	549	795	18	259	592	869
PTAN	3	33	19	55	3	34	20	57
PTAS	0	7	153	160	0	7	164	171
PTKL	3	21	4	28	3	28	7	38
Total	49	336	733	1.118	54	373	791	1.218

Tabel IV-6. Sebaran peringkat terakreditasi Program Studi berdasarkan kelompok PT (per 1 Desember 2017)

Kelompok	Akreditasi 2016				Akreditasi 2017			
	A	B	C	Total	A	B	C	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PTN	1.546	2.609	721	4.876	1.547	2.473	556	4.576
PTS	573	4821	5.711	11.105	570	5.320	4.874	10.764
PTAN	190	754	295	1.239	191	693	233	1.117
PTAS	12	430	1046	1.488	12	417	935	1.364
PTKL	48	261	76	385	56	445	126	627
Total	2.369	8.875	7.849	19.093	2.376	9.348	6.724	18.448

Berdasarkan data pada www.forlap.ristekdikti.go.id, jumlah perguruan tinggi secara keseluruhan ditunjukkan pada Tabel IV-7 dan Tabel IV-8. Berdasarkan data ini maka, pada akhir tahun 2017 masih terdapat 3.372 perguruan tinggi dan 7.783 perguruan tinggi yang belum terakreditasi.

Tabel IV-7. Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia

Bentuk	PTN	PTS	PTAN	PTAS	PTKL	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Akademi		1.002		4	84	1.090
Politeknik	43	149			66	258
Sekolah Tinggi		1.419	42	979	30	2.470
Institut	13	68	38	66	1	186
Universitas	63	489	18		1	571
Akademi Komunitas	3	12			0	15
Jumlah	122	3.139	98	1049	182	4.590

Tabel IV-8. Jumlah Program Studi di Indonesia

	PTN	PTS	PTAN	PTAS	PTKL	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Studi	6.500	13.876	2.317	2.732	806	26.231

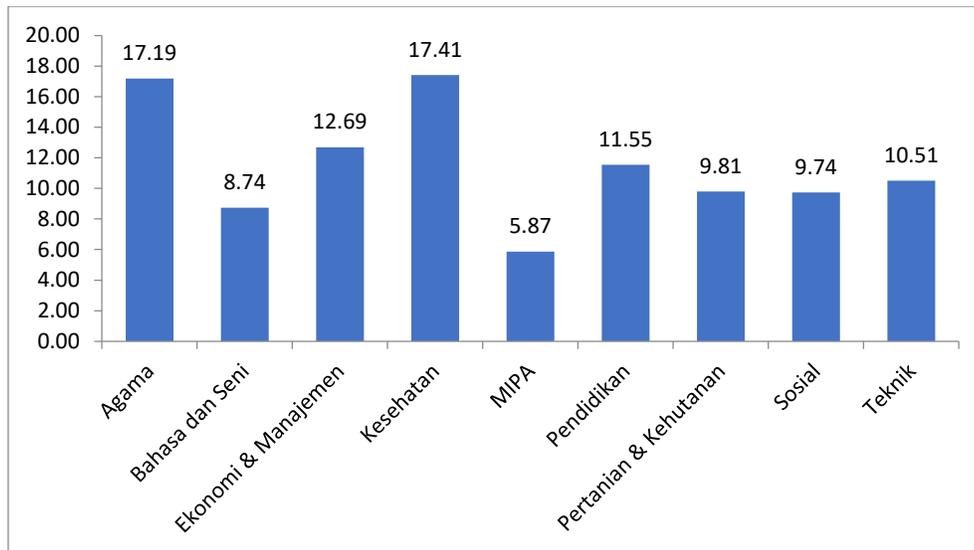
B. Pengembangan Asesor

Pada saat DE mulai melaksanakan tugas di akhir tahun 2016, tidak diperoleh data asesor yang valid terutama terkait jumlah, kualifikasi dan kompetensi asesor, catatan kinerja asesor terutama terkait profesionalisme, integritas, dan catatan lain yang sangat diperlukan untuk pengembangan asesor. Oleh karena itu DE menetapkan beberapa langkah untuk pengembangan asesor yang meliputi: 1) *updating database* asesor; 2) evaluasi kinerja asesor oleh validator; 3) *feedback* asesmen lapangan oleh PS/PT; 4) *recruitment* asesor; 5) pelatihan dan penyegaran asesor; dan 6) dan pembuatan Sistem Aplikasi Penugasan Asesor.

1. Updating database asesor

Sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat total Asesor BAN-PT sebanyak 1735 asesor, yang terdiri dari 1284 asesor (74%) laki laki, dan 451 orang (26%) asesor perempuan. Jika dilihat kualifikasi akademiknya, 78% asesor berkualifikasi doctor. Berdasarkan institusi asal, asesor BAN-PT paling banyak berasal dari universitas diikuti institut dan politeknik. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, data PS yang tercatat dalam *database* BAN-T adalah sebanyak 20.255 program studi. Ketersediaan asesor untuk masing masing program studi (rasio asesor dibanding program studi) tersaji pada Gambar IV-3. Data-data mengindikasikan bahwa BAN-PT masih memerlukan banyak asesor untuk rumpun ilmu Agama. Kebutuhan asesor untuk rumpun ilmu kesehatan juga masih sangat tinggi, namun karena

akreditasi rumpun tersebut berada di bawah LAM-PTKes, maka tidak menjadi prioritas BAN-PT.



Gambar IV-3. Rasio program studi dan asesor

2. Evaluasi kinerja asesor

Kinerja asesor dipantau oleh DE melalui evaluasi hasil kerja (laporan) yang dilakukan oleh validator, dan evaluasi kinerja pada saat melaksanakan AL oleh perguruan tinggi.

Evaluasi kinerja asesor oleh Validator. Sejak Oktober 2016, dilakukan evaluasi terhadap kinerja asesor berdasarkan validasi hasil AK, revalidasi hasil AL, dan laporan/dokumen lain yang relevan. Evaluasi ini terutama ditujukan untuk mengidentifikasi insiden copy & paste, ketidakmampuan asesor membuat deskripsi temuan AK dan/atau hal lain yang relevan.

Sampai dengan akhir Desember 2017 telah dilakukan 15 tahap APS dan 5 tahap APT yang meliputi 3.310 penugasan asesor APS dan 637 penugasan asesor APT. Dari 3.310 penugasan asesor APS ditemukan 85 asesor (2,57%) yang bermasalah terkait deskripsi yang tidak baik, penilaian yang tidak sesuai panduan, atau hal teknis lainnya; dan 92 asesor (2,78%) yang melakukan *copy & paste* dari pekerjaan sendiri atau pekerjaan partnernya. Sementara itu, dari 637 penugasan asesor APT, hanya ditemukan 3 asesor (0,47%) yang bermasalah terkait deskripsi yang tidak baik atau penilaian yang tidak sesuai panduan, dan 3 asesor (0,47%) yang melakukan *copy & paste* dari pekerjaan partnernya. Hal ini mengindikasikan bahwa asesor APT secara umum memiliki kinerja yang lebih baik.

Umpan balik asesmen lapangan oleh PT. Pada bulan Mei 2017 DE mulai menjaring umpan balik asesmen lapang dari PT. Instrument untuk menangkap umpan balik tersebut dimuat dalam laman BAN-PT (<https://www.banpt.or.id/blog?id=40>), dan pihak PT diminta untuk menyampaikan feedback segera setelah asesmen lapangan selesai dilaksanakan. Informasi tentang umpan balik ini juga dimuat dalam surat pemberitahuan asesmen lapangan.

Sampai dengan 31 Desember 2017 diperoleh feedback dari 839 responden untuk pelaksanaan akreditasi program studi dan 129 responden untuk akreditasi perguruan tinggi, dan secara ringkas diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Tidak ada indikasi conflict of interest antara asesor dan program studi
- b) Asesor bekerja secara profesional, dan tidak menerima/meminta pemberian yang terkait dengan posisinya sebagai asesor.
- c) Penilaian PT atas kinerja asesor oleh pimpinan program studi dan institusi tersaji pada Tabel IV-9 dan Tabel IV-10. Kedua data menunjukkan bahwa kinerja asesor APS dan APT berada dalam kisaran baik dan sangat baik.

Tabel IV-9. Rekapitulasi penilaian responden akreditasi program studi

Nilai	Asr 1	Asr 2
1 (Sangat Kurang)	1	
2 (Kurang)	2	2
3 (Cukup Baik)	5	9
4 (Baik)	152	160
5 (Sangat Baik)	671	660
Tidak Diisi	8	8
Total	839	839

Tabel IV-10. Rekapitulasi penilaian responden akreditasi institusi

Nilai	Asr 1	Asr 2	Asr 3	Asr 4	Asr 5	Total
3 (Cukup)	1	2	1			4
4 (Baik)	27	26	9	4		66
5 (Sangat Baik)	98	98	28	11	1	236
Tidak Diisi	3	3				6
Total	129	129	38	15	1	312

Recruitment asesor; Pada tahun 2017, BAN-PT melaksanakan satu kali kegiatan recruitment asesor. Secara umum tujuan seleksi asesor adalah untuk memenuhi kebutuhan asesor BAN-PT. Proses rekrutmen asesor dilakukan berbasis merit dan bebas dari konflik kepentingan. Seleksi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 4-6 Oktober 2017, bertempat di Hotel Grand Whiz Kelapa Gading - Jakarta. Mekanisme penjurian calon asesor dilakukan berdasarkan nominasi dari pihak yang terpercaya (*credible*) dengan mengacu pada keterpenuhan syarat eligibilitas sesuai kriteria yang ditetapkan BAN-PT. Seleksi calon asesor akan dilaksanakan dalam 3 tahapan seleksi yaitu: 1) seleksi administratif; 2) test psikologi; dan 3) wawancara. Dari 100 orang calon asesor yang dinominasikan dan diundang oleh DE, 93 orang hadir mengikuti seleksi asesor, dan 87 diantaranya direkomendasikan menjadi asesor BAN-PT **Error! Reference source not found.** Calon asesor yang direkomendasikan diberikan pelatihan asesmen.

3. Pelatihan dan penyegaran asesor;

Pada tahun 2017 dilakukan 2 (dua) kali kegiatan pelatihan dan penyegaran asesor. Pelatihan asesor tahap 1 tahun 2017 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 23-25 Maret 2017 di Hotel Merapi Merbabu - Bekasi, dan melibatkan 10 orang fasilitator dan 5 narasumber. Pelatihan ini terbagi dalam 2 grup yaitu 1) pelatihan asesor untuk 58 asesor baru yang direkrut pada tahun 2016; dan 2) penyegaran untuk 42 asesor BAN-PT hasil evaluasi penugasan periode September – Desember 2016.

Pada pelatihan asesor tahap 1, dari 100 orang peserta yang diundang, seluruh asesor baru mengikuti pelatihan asesor, sementara 3 asesor peserta penyegaran tidak hadir mengikuti kegiatan penyegaran asesor. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh fasilitator terhadap kedisiplinan, aktivitas, dan kemampuan peserta pelatihan direkomendasikan: 1) seluruh asesor baru (58 orang) direkomendasikan untuk mendapat penugasan asesmen, dengan rata-rata nilai 6,25 (skala 1-7, tanpa skor 4); 2) 1 orang peserta penyegaran tidak direkomendasikan untuk penugasan karena rata-rata skornya hanya 3,33. Hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyegaran yang diperoleh dari feedback peserta pelatihan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta akan materi kegiatan sangat tinggi (rata-rata skor 6,20; skala 1-7, tanpa skor 4), dan tingkat kepuasan terhadap layanan pelatihan juga sangat tinggi (rata-rata skor 6,29; skala 1-7, tanpa skor 4).

Pelatihan asesor tahap 2 tahun 2017 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, Rabu – Jumat, 6 – 8 November 2017, di eL Royal Hotel Kelapa Gading Jakarta, dan melibatkan 10 orang fasilitator dan 15 narasumber. Pelatihan ini diikuti oleh 99 orang asesor yang terdiri dari 83 asesor baru yang direkrut pada tahun 2017 dan 16 asesor lama BAN-PT yang berkinerja bagus.

Pada pelatihan asesor tahap 2 ini, dari 87 orang asesor baru yang lolos seleksi dan diundang, 80 orang asesor baru mengikuti pelatihan asesor, sementara 7 asesor peserta penyegaran tidak hadir mengikuti kegiatan penyegaran asesor. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh fasilitator terhadap kedisiplinan, aktivitas, dan kemampuan peserta pelatihan diperoleh rata-rata nilai rata-rata 6,65 (skala 1-7, tanpa skor 4), dan seluruh asesor baru yang telah mengikuti pelatihan (80 orang, Lampiran-1) direkomendasikan untuk mendapat penugasan asesmen. Hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyegaran yang diperoleh dari feedback peserta pelatihan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta akan materi kegiatan sangat tinggi (rata-rata skor 6,20; skala 1-7, tanpa skor 4), dan tingkat kepuasan terhadap layanan pelatihan juga sangat tinggi (rata-rata skor 6,29; skala 1-7, tanpa skor 4).

4. Pengembangan Modul Aplikasi Penugasan Asesor.

Pada Tahun 2017, DE telah selesai mengembangkan modul penugasan asesor yang dibantu oleh mahasiswa PKL dari Universitas Indonesia dan Tim pengembang SAPTO. Modul ini disusun berdasarkan SOP penugasan asesor yang telah diterapkan di BAN-PT. Berbasis *database* asesor yang semakin valid dan reliable, modul ini akan diintegrasikan dengan SAPTO sehingga akan mempermudah kerja DE dalam menugaskan asesor. Secara umum modul ini memiliki fungsionalitas utama sebagai berikut:

- a) Memberi saran/rekomendasi secara otomatis asesor yang akan ditugaskan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan BANPT.
- b) Mencatat frekuensi penugasan sehingga rekomendasi diprioritaskan bagi asesor yang memenuhi kriteria dan dengan frekuensi penugasan terendah.
- c) Memberi peluang kepada DE untuk mengesampingkan saran jika dalam hal khusus perlu dilakukan pengecualian,

Dengan modul aplikasi di atas diharapkan bukan hanya akan memperlancar tugas DE dalam penugasan asesor, tapi juga akan mendistribusikan beban asesmen secara lebih merata.

C. Studi Hasil Akreditasi dan Kepuasan Pengguna

Dalam rangka meningkatkan mutu proses akreditasi, khususnya sebagai landasan untuk mengembangkan instrument akreditasi, Dewan Eksekutif BANPT membentuk dua tim studi yaitu, Tim Studi Hasil Akreditasi dan Tim Studi Kepuasan Masyarakat. Bagian ini menjelaskan ringkasan pelaksanaan dan hasil kedua studi dimaksud. Laporan lengkap masing-masing studi dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

1. Studi Hasil Akreditasi

Studi ini dimaksudkan untuk mempelajari efektivitas proses akreditasi yang diselenggarakan BAN-PT. Dalam hal ini, proses akreditasi dikatakan efektif jika hasil akreditasi yang berupa status akreditasi dan peringkat terakreditasi berkorelasi positif dengan kualitas suatu perguruan tinggi dan/atau program studi.

Suatu tim yang terdiri dari 4 orang pakar dengan komposisi: pakar Pendidikan tinggi, pakar penjaminan mutu Pendidikan tinggi, dan pakar statistic, direkrut oleh DE dan ditugaskan untuk melakukan studi dalam kurun waktu 6 bulan (Agustus – Desember 2017). Tim studi didukung oleh staff bagian data secretariat BAN-PT yang bertugas untuk memfasilitasi tim dengan data hasil akreditasi serta dokumen yang terkait.

Untuk memudahkan pengukuran efektivitas hasil akreditasi pada level institusi, tim studi memilih perguruan tinggi sampel berdasarkan perbedaan misi, yaitu perguruan tinggi riset, perguruan tinggi vokasi, dan perguruan tinggi lainnya. Secara umum ditemukan adanya korelasi yang cukup signifikan antara hasil akreditasi dengan kualitas input. Namun jika dilihat dari aspek output tingkat korelasi kurang terlihat. Hal ini tentu saja dapat dipahami mengingat instrument akreditasi yang digunakan selama ini masih menitikberatkan pada aspek input seperti jumlah dan kualifikasi dosen, mutu sarana dan prasarana, keberadaan SOP dan lainnya.

Untuk melihat efektivitas proses akreditasi pada level program studi, dipilih beberapa bidang yang telah memiliki ukuran standar untuk mutu lulusan, yang dalam hal ini adalah: kesehatan, akuntansi, teknik sipil, dan Pendidikan. Untuk bidang kesehatan alat ukur mutu menggunakan prosentase kelulusan pada UKDI, bidang akuntansi menggunakan tingkat kelulusan dalam uji profesi akuntan, bidang Teknik sipil menggunakan pencapaian status kualifikasi muda, madya dan utama oleh Lembaga uji profesi insinyur Teknik Sipil; dan untuk bidang kependidikan menggunakan hasil Uji Kompetensi Guru.

Secara umum diperoleh adanya korelasi yang baik antara status akreditasi dan peringkat terakreditasi khususnya untuk peringkat A; Sementara untuk peringkat B, dan C, korelasi tampak cukup rendah.

Tim studi melakukan kajian secara mendalam tentang mutu instrument akreditasi melalui analisis terhadap butir-butir penilaian baik untuk APT maupun APS. Temuan utama dari analisis adalah:

- a. Instrument akreditasi yang digunakan BANPT memuat butir-butir yang meskipun memiliki relevansi yang baik dengan ukuran mutu, namun dapat dengan mudah direkayasa oleh pihak perguruan tinggi sehingga seolah-olah telah memenuhi standar mutu yang baik meskipun kenyataannya sebetulnya tidak demikian.
- b. Instrument memuat butir dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak memungkinkan bagi asesor untuk secara seksama memverifikasinya saat proses kunjungan ke lapangan. Dalam hal ini, durasi waktu yang dialokasikan untuk asesmen lapangan dinilai tidak mencukupi.
- c. Beberapa butir dalam instrument sebenarnya cukup tinggi relevansinya dengan ukuran mutu, namun asesor kurang memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan kemudian memverifikasi serta menilai butir tersebut dengan tepat. Dalam hal ini, kemampuan asesor dipandang kurang memadai.
- d. Beberapa butir dalam instrument sama sekali tidak dapat membedakan tingkat mutu objek yang dinilai.

Dari studi ini, tim menyimpulkan bahwa instrument akreditasi perlu disempurnakan dan kompetensi asesor perlu ditingkatkan, dan merekomendasikan ihwal berikut:

1. BANPT harus mengembangkan instrument akreditasi yang lebih bersifat kualitatif dan menitikberatkan pada aspek outputs dan outcomes.
2. Penilaian akreditasi harus didasari atas laporan evaluasi diri yang disusun dan disajikan secara comprehensive dan memuat tingkat analisis yang mendalam
3. Harus ada hubungan yang tinggi antara proses akreditasi sebagai penjaminan mutu eksternal dengan proses penjaminan mutu internal, serta memanfaatkan data/informasi yang ada di PDDikti.

Laporan lengkap studi ini diperlihatkan pada Lampiran 2.

2. Studi Kepuasan Masyarakat

Menurut Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. Melihat tugas pokok dan fungsi BAN-PT maka BAN-PT merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan Publik. Menurut PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, menggunakan indikator

dan metodologi survei yang sudah ditentukan, guna memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dan melaporkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Tujuan umum dari kegiatan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja BAN-PT dalam memberikan pelayanan terkait akreditasi.
- 2) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan akreditasi oleh BAN-PT.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan BAN-PT terkait akreditasi.
- 4) Meningkatkan inovasi penyelenggaraan pelayanan akreditasi oleh BAN-PT.

Tujuan khusus dari kegiatan **Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017** adalah:

- 1) Menyusun instrumen Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BAN-PT.
- 2) Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan akreditasi oleh BAN-PT.
- 3) Menyusun rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan BAN-PT

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survei online dengan menggunakan kuesioner untuk memotret persepsi pengguna layanan BAN-PT. Kuesioner dapat diakses oleh Pimpinan Institusi atau Program Studi di laman BAN-PT. Kuesioner terdiri dari 40 item pernyataan mengenai layanan BAN PT, yang mencakup penilaian tingkat kepuasan dan penilaian pada aspek:

- 1) Persyaratan Proses Penilaian Akreditasi
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Penilaian Akreditasi
- 3) Waktu Penyelesaian Proses Akreditasi
- 4) Transparansi Biaya Proses Penilaian Akreditasi
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Proses Penilaian Akreditasi
- 6) Kompetensi Pelaksana dalam Proses Penilaian Akreditasi
- 7) Perilaku Pelaksana dalam Proses Penilaian Akreditasi
- 8) Penanganan Pengaduan dalam Proses Penilaian Akreditasi
- 9) Sarana dan Prasarana dalam Proses Penilaian Akreditasi

Setiap item memiliki 2 komponen yang meliputi:

- a. **Tingkat Kepuasan** (skala 1-7, dari paling rendah sampai paling tinggi): untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan pada pertanyaan yang diberikan
- b. **Tingkat Kepentingan** (skala 1-7, dari paling rendah sampai paling tinggi): untuk mengetahui seberapa penting layanan pada pertanyaan dilaksanakan dalam proses akreditasi

Responden survei adalah yang menggunakan layanan BAN-PT dalam lima tahun terakhir, yaitu: a) Pimpinan Perguruan Tinggi (Layanan Akreditasi Perguruan Tinggi); b) Pimpinan Program Studi (Layanan Akreditasi Program Studi). Pengisian survei dibuka sejak November sampai dengan 31 Desember 2017. Sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat responden yang mengisi kuesioner adalah 296 program studi dan 75 institusi. Data yang diperoleh di analisis dengan Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Biplot, dan *Importance Performance Analysis* (IPA).

Hasil studi analisis data responden program studi dan institusi sebagaimana terdapat pada Tabel IV-11 dan Tabel IV-12 **Error! Reference source not found.** menunjukkan bahwa Secara umum, indeks kepuasan lebih dari cukup (> skala 4, presentase 50%. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi hasil survei, diperoleh informasi mengenai layanan dengan tingkat kepuasan secara umum (prodi dan institusi) tinggi sehingga yang perlu dipertahankan kualitas layanannya sebagai berikut.

- 1) Kapabilitas asesor sebagai penilai dalam proses penilaian akreditasi Prodi
- 2) Kepatuhan para asesor dalam menjalankan proses penilaian sesuai etika yang telah ditetapkan
- 3) Sikap profesional para asesor dalam menjalankan proses penilaian akreditasi
- 4) Kedisiplinan para asesor terhadap kode etik dalam proses penilaian akreditasi
- 5) Kemampuan asesor untuk bertindak adil dalam proses penilaian akreditasi Prodi

Berdasarkan rekapitulasi hasil survei, diperoleh juga informasi mengenai layanan dengan tingkat kepuasan secara umum (prodi dan institusi) terendah sehingga yang perlu dilakukan pembenahan untuk peningkatan layanan yaitu:

- 1) Kecepatan respon dalam proses komunikasi (tertulis, tak tertulis, maupun surat elektronik)
- 2) Kejelasan informasi terkait dengan proses pelaksanaan penilaian akreditasi institusi
- 3) Ketepatan waktu penyelesaian administrasi dari terbitnya surat kelengkapan berkas hingga kepastian jadwal visitasi
- 4) Ketepatan waktu penyampaian hasil akreditasi sesuai batas waktu yang dijanjikan BAN-PT dalam laman

- 5) Kelengkapan informasi terkait dengan proses pelaksanaan penilaian akreditasi

Hasil lengkap studi kepuasan stake holders BAN-PT ini diperlihatkan Lampiran 3.

Tabel IV-11. Tingkat kepuasan per aspek untuk responden program studi

No	Aspek	Indeks Kepuasan	Persentase
1 A	PERSYARATAN	5,65	77,53%
2 B	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	5,74	79,08%
3 C	WAKTU PENYELESAIAN PROSES	5,56	76,03%
4 D	TARIF/BIAYA	5,52	75,25%
5 E	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	5,71	78,52%
6 F	KOMPETENSI PELAKSANA	6,01	83,44%
7 G	PERILAKU PELAKSANA	6,08	84,75%
8 H	PENANGANAN PENGADUAN	5,69	78,22%
9 I	SARANA & PRASARANA	5,76	79,27%
Rata-rata Terboboti		5,80	80,06%
Overall		5,94	82,38%

Tabel IV-12. Tingkat kepuasan per aspek untuk responden perguruan tinggi

No	Aspek	Indeks Kepuasan	Persentase
1 A	PERSYARATAN	5,72	78,61%
2 B	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	5,73	78,78%
3 C	WAKTU PENYELESAIAN PROSES	5,56	76,00%
4 D	TARIF/BIAYA	5,94	82,33%
5 E	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	5,81	80,11%
6 F	KOMPETENSI PELAKSANA	5,96	82,73%
7 G	PERILAKU PELAKSANA	6,19	86,51%
8 H	PENANGANAN PENGADUAN	5,74	79,00%
9 I	SARANA & PRASARANA	5,83	80,56%
Rata-rata Terboboti		5,86	81,04%
Overall		5,97	82,89%

D. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan

1. Perpanjangan MoU dengan Beberapa Mitra Internasional

Jalinan kerjasama BAN-PT dengan berbagai mitra internasional senantiasa dikembangkan demi mewujudkan aliansi strategis dan rekognisi di forum internasional. Pada tahun 2017 telah diperpanjang beberapa dokumen kerjasama dengan mitra internasional yaitu dengan QAA – United Kingdom, NIAD – Japan, dan MQA Malaysia, HEEACT – Taiwan, dan NAAA Timor Leste. Kerjasama dengan HEEACT telah ditindaklanjuti dengan kerjasama riset tentang system akreditasi yang memperoleh pendanaan dari INQAAHE dan akan dilaksanakan pada tahun 2018.

2. Pelaksanaan ASEAN QAA Conference

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Lembaga-lembaga Penjaminan Mutu Eksternal di kawasan ASEAN, lokakarya “saling berbagi” dengan tema “**Sharing Good Practices in Standards, Procedures and Assessors’ Development**” telah diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2017 yang lalu. Lokakarya ini diselenggarakan oleh BAN-PT bekerjasama dengan AQAN dengan dukungan dari EU-SHARE (*European Union –Support to Higher Education in the ASEAN Region*).

Lokakarya diawali dengan Upacara Pembukaan yang diisi dengan sambutan dari: Rear Admiral Wachara Kkarunyavanij: *President of ASEAN Quality Assurance Network*, Dr. Ir. Patdono Suwignyo, M.Eng.Sc.: Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi. Upacara pembukaan diawali dengan Laporan Penyelenggaraan Lokakarya oleh Direktur Eksekutif BAN-PT, Prof. T. Basaruddin. Lokakarya diselenggarakan dalam format sebagai berikut. Setiap negara memaparkan pengalamannya dalam pelaksanaan penjaminan mutu eksternal di negara masing-masing, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi serta praktik-praktik pelaksanaan PME yang baik. Sesi Berbagi dan *Country Report* ini berlangsung pada hari pertama lokakarya dan menampilkan Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, dan Viet Nam. Setiap peserta lokakarya secara aktif terlibat dalam sesi berbagi ini.

Pakar-pakar dibidang penjaminan mutu pendidikan tinggi tingkat internasional mengemukakan pendapat mereka di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bentuk studi kasus, serta memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk penyempurnaan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peserta

lokakarya mengikuti sesi ini dengan penuh perhatian dan secara aktif terlibat dalam sesi Tanya Jawab.

Para pakar internasional tersebut adalah: Ms. Andrea Bateman, *ASEAN Higher Education Consultant*, Prof. Angela Yung Chi Hou, Ph.D: *Vice President, Asia Pacific Quality Network* dan *Executive Director of HE Evaluation & Accreditation Council, Taiwan*, Ms. Eve McMahon, Ph.D: *Quality Assurance Manager, New Zealand Qualifications Authority*, Prof. Zita Mohd. Fahmi: *Secretary of AQAN and Chair for Technical Expert Group for Quality Assurance of the EU*.

Peserta kegiatan ini meliputi High-ranked Officials dari kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama, Seluruh anggota MA dan DE BAN_PT, perwakilan LAM-PTkes, perwakilan 9 negara anggota AQAN, perwakilan staf AQAN, serta perwakilan dari program EUSHA. Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan mendapat apresiasi dari seluruh peserta.

3. Pelaksanaan External Review

Dalam upaya memperoleh pengakuan masyarakat regional dan internasional, maka BAN-PT telah melakukan kegiatan *external review* oleh asosiasi lembaga akreditasi internasional, dalam hal ini AQAN bekerjasama dengan *The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)*. Pada semester pertama tahun 2017 BAN-PT kegiatan ini diisi dengan penyusunan *Self Assessment Report (SAR)*, yang menjadi dasar review oleh pihak AQAN.

Tujuan kegiatan ini adalah (1) BAN-PT mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara organisasi, sistem dan kebijakan akreditasi serta pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT dengan kerangka penjaminan mutu Asean (*Asean Quality Assurance Framework, AQAF*) dan (2) Mendapatkan masukan mengenai perbaikan yang harus dilakukan untuk peningkatan kinerja organisasi dan pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT. Pelaksanaan External Review telah dilakukan pada tanggal 19 - 21 September 2017 bertempat di kantor BAN-PT.

External review dilaksanakan dengan menghadirkan representasi stakeholders sebagaimana tercantum pada Tabel IV-13.

1. *BAN-PT is a well-established agency that reaches a high level of alignment with quadrants 1 and 2 of the AQAF.*
2. *The panel highlight in particular the design of the accreditation procedures in line with international good practice and the transparent guidance for all parties involved in the accreditation procedures which supports a professional and consistent conduct of the procedures. Related to this BAN-PT is to be commended for the intended shift from an input-oriented approach towards a more output and outcome-oriented approach to accreditation, which will support the enhancement dimension of quality assurance.*

3. *The panel recommendations, which are to be understood as supporting BAN-PT to strengthen its future developments in particular as regards the implementation of the new accreditation approach, which is going to be a challenge for all parties involved, the higher education institutions, the assessors and also the staff of BAN-PT. Further recommendations address BAN-PT's collaboration with external stakeholders namely employers and students which should be intensified and formalized on a regular basis and its internal quality management system which also should be developed and implemented on a regular basis.*

Tabel IV-13. Perwakilan stakeholders BAN-PT dalam kegiatan External Review

	Stake holders	Jumlah yang hadir
1.	Kementerian	2
2.	Pimpinan Perguruan Tinggi	5
3.	Kantor Penjaminan Mutu PT	4
4.	Asesor APS	6
5.	Aseor APT	5
6.	Pengguna lulusan	3
7.	Mahasiswa	4
8.	MA	5
9.	DE	5
10.	Staf Sekretariat	3

Pada laporan akhir external review, pannel memberikan kesimpulan, *commendation*, dan *recommendation* sbb:

Laporan lengkap hasil external review ini diperlihatkan pada Lampiran 4.

4. Keterlibatan dalam organisasi internasional

Dalam rangka meningkatkan international visibility BANPT, DE secara aktif ikut dalam berbagai forum internasional. Pada bulan Februari 2017, Direktur DE ditetapkan sebagai Vice-President dari International QA for Islamic World (IQA). Posisi ini dijabat untuk periode waktu 2 tahun. Selanjutnya pada bulan September 2017, Direktur DE juga telah ditetapkan sebagai President of AQAN untuk periode 3 tahun. Selain itu, sebagai anggota dari APQN dan INQAAHE, BANPT juga selalu berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi tersebut. Tahun 2018 BANPT dipercaya untuk menyelenggarakan APQN Global Summit.

E. Pengembangan Sistem IT

1. Infrastruktur dan Jaringan

Infrastruktur dan jaringan di BAN-PT telah disempurnakan bersamaan dengan kepindahan dari Jl. RS. Fatmawati, Cipete, RT.6/RW.5, Cipete Sel., Cilandak, Kota Jakarta Selatan ke Gedung 2 BPPT Jl. M.H. Thamrin 8, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa server dan piranti jaringan yang dari Cipete juga telah dipindahkan ke lokasi yang baru.

Sesuai kebijakan Kemristekdikti, seluruh sarana dan prasarana TIK di lingkungan kementerian disediakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kemristekdikti. BAN-PT sebagai pengguna sarana yang berada di lingkungan Kemristekdikti tentu juga harus mengikuti kebijakan dimaksud. Selain system server yang dulu telah beroperasi di Cipete, BAN-PT telah mendapat dukungan system server dari PUSDATIN, seperti halnya web-server untuk direktori BAN-PT dan server untuk system aplikasi SAPTO.

Selain system server dan jaringan, pengamanan system TIK BAN-PT juga berada dalam system pengamanan TIK (IT security system) yang telah disiapkan oleh PUSDATIN.

Selain memanfaatkan bandwidth internet yang disediakan oleh Kementerian, BAN-PT juga menyiapkan koneksi back-up untuk menjadi alternative jika ada permasalahan pada jaringan yang telah disediakan. Hal ini sangat penting mengingat system akreditasi SAPTO harus beroperasi secara menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Untuk meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam menjamin reliabilitas dan keamanan system infrastruktur IT, BANPT berkoordinasi dengan PUSDATIN telah memasang system cluster server berikut system pengamanan sendiri dan menempatkannya di pusat data Lt 8 Gedung BPPT2. Sistem cluster sever dimaksud didedikasikan khusus untuk keperluan BANPT dan dikelola secara mandiri oleh administrator BANPT. Kapasitas system telah memperhitungkan keperluan storage maupun kemampuan komputasi BANPT dengan beroperasinya system SAPTO sebagai satu-satunya moda pemrosesan usulan akreditasi.

2. Sistem Aplikasi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi, DE memandang perlu untuk mengembangkan beberapa system aplikasi. Ada beberapa sistem aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2017, yaitu: Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online atau disingkat SAPTO, system aplikasi persuratan, system aplikasi

pengelolaan asesor, dan modul pembacaan laporan AL, system pengelolaan keuangan.

a. Sistem Aplikasi SAPTO

SAPTO yang telah dimulai pengembangannya pada akhir tahun 2016 telah diimplementasikan sejak April 2017. SAPTO adalah sistem yang dikembangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT. SAPTO mendukung setiap proses yang dilakukan dalam akreditasi seperti pengajuan usulan akreditasi oleh perguruan tinggi, pemeriksaan dokumen, penugasan asesor dan validasi yang dilakukan, proses asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL) oleh asesor.

Agar implementasi SAPTO dapat berjalan lancar, telah dilaksanakan berbagai pelatihan untuk berbagai kalangan pengguna, yaitu:

- a. Training bagi pemeran SAPTO di BAN-PT: serangkaian kegiatan pelatihan untuk staff sekretariat BANPT telah diselenggarakan pada periode waktu hingga akhir Juni 2017. Substansi pelatihan yang telah diberikan untuk staff sekretariat antara lain: pengelolaan system aplikasi, penerimaan dokumen usulan akreditasi, overview proses online. Tentu saja diakui bahwa pelatihan yang bersifat lebih spesifik untuk kelompok user internal masih perlu dilanjutkan.
- b. TOT bagi calon trainer penggunaan SAPTO: mengingat jumlah pengguna SAPTO yang sangat besar, maka dipersiapkan 50 pelatih sapto yang dipilih dari asesor yang memiliki latar belakang keilmuan dalam bidang IT.
- c. Training bagi para asesor SAPTO: pelatihan untuk asesor dilaksanakan bersamaan dengan proses AK. Secara keseluruhan telah tercatat tidak kurang dari 1500 asesor yang telah mengikuti pelatihan SAPTO.
- d. Training operator PT: Pelatihan pengguna sapto dari perguruan tinggi dilakukan dengan berbagai skema. Pengguna dari PTN dilakukan secara terpusat di Jakarta. Sementara pelatihan untuk pengguna yang lain diselenggarakan melalui bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu: Koordinator Kopertis, organisasi seperti ABPTSI, APTIKOM, HILDIKTIPARI, dan Muhammadiyah. Untuk PT di lingkungan Kemenag dan KL, pelatihan diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama, PPSDM Kementerian Kesehatan, dan lain-lain.

Jumlah peserta pelatihan SAPTO bagi pengguna perguruan tinggi diperlihatkan pada Tabel IV-14.

Tabel IV-14. Pelaksanaan pelatihan SAPTO bagi pengguna perguruan tinggi

No.	Bulan	Mitra/Pelaksana Kegiatan	Jumlah	
			Peserta	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	April	BAN-PT	92	92
		DIKTI Muh.	103	62
		Kopertis X	32	30
2	Mei	BPPSDM Kes	38	38
		ABPPTSI Jabar	154	64
		APTIKOM	95	53
		UM Makassar	134	62
		PDPT Kristen Indo.	75	52
		APTIKOM-APTISI	165	67
		Kemenag	84	52
		Hildiktipari	52	34
		STAHN	112	60
		Kopertis II	150	147
		Kopertis III	75	75
		Kopertis IV (2 kali)	252	200
		Kopertis IX	305	214
		Kopertis VI	160	155
		Kopertis VII	328	282
		Kopertis VIII	150	135
		Kopertis IX	25	25
Kopertis X	132	89		
Kopertis XI	108	57		
Kopertis XII	65	43		
Kopertis XIV	114	52		
3	Juni	PASTI	118	62
		Bimas Kristen	86	45
		Kopertis I	247	237
		Kopertis III	315	85
		Kopertis VI	80	65
		Kopertis IX	305	214
		Kopertis X	75	42
		Kopertis XIII	45	34
Jumlah			4271	2924

Masa transisi perlu diantisipasi dengan cermat, sehingga saat SAPTO mulai diterapkan berarti seluruh rangkaian kegiatan akreditasi sudah dilakukan secara online, yaitu mulai dari registrasi dan pemasukan proposal usulan akreditasi hingga selesainya SK dan sertifikat akreditasi. Tentu hal ini akan dimulai dengan penghentian pengajuan proposal yang secara manual atau *hard-copy* dan segera dimulainya pemasukan proposal usulan akreditasi secara online.

Data pengguna SAPTO Perguruan Tinggi sampai dengan Desember 2017 diperlihatkan pada Tabel IV-15.

b. Sistem Aplikasi Persuratan

Selama semester 1 tahun 2017, telah dikembangkan sebuah sistem aplikasi yang akan digunakan untuk menangani persuratan yang dikelola BAN-PT. Sistem ini memiliki fitur penerimaan surat, disposisi, laporan pelaksanaan disposisi, serta penelusuran posisi surat. Sistem ini akan digunakan terutama oleh bagian sekretariat BAN-PT

c. Modul Aplikasi Penugasan Asesor

Modul ini didesain untuk membantu DE dalam menetapkan panel asesor yang akan melakukan asesmen di PS atau PT. Penetapan panel asesor untuk akreditasi PS dilakukan dengan mempertimbangan aspek: kesejawatan, jumlah asesor, lokasi penugasan dan asal asesor, jenis pengelolaan perguruan tinggi, kesesuaian program dan pendidikan asesor, kesesuaian program yang diases dengan institusi asal asesor, dan status akreditasi PS yang diases dan akreditasi PS asal asesor. Sementara itu untuk penugasan asesor APT dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah asesor, lokasi penugasan dan asal asesor, bentuk perguruan tinggi, dan status akreditasi perguruan tinggi yang diases dan akreditasi perguruan tinggi asal asesor.

Modul ini antara lain memuat nama program studi, program, institusi pengusul, alamat, rencana asesmen, dan panel asesor yang akan ditugaskan. Dengan memasukkan identitas program studi yang akan diusulkan, sistem akan merekomendasikan nama asesor dalam panel yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jumlah penugasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan. Jika usulan asesor disetujui DE, maka panel dapat ditetapkan, jika DE menolak panel yang diusulkan oleh sistem, maka sistem akan mengajukan panel baru berikutnya, dengan aturan yang sama.

Tabel IV-15. Data Pengguna SAPTO

Bentuk	PTN			PTS			PTAN			PTAS			PTKL			Jumlah PT	Jumlah Sapto
	Jumlah	Sapto	Persen														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Akademi				1.002	272	27,15				4		0,00	84	6	7,14	1.090	278
Politeknik	43	33	76,74	149	78	52,35							66	23	34,85	258	134
Sklh Tinggi				1.419	762	53,70	42	19	45,24	979	399	40,76	30	14	46,67	2.470	1.194
Institut	13	10	76,92	68	59	86,76	38	27	71,05	66	42	63,64	1			186	138
Universitas	63	61	96,83	489	415	84,87	18	17	94,44				1	1	100,00	571	494
Aka.Komunitas	3		0,00	12		0,00							0			15	0
Jumlah	122	104		3.139	1.586		98	63		1049			182			4.590	2.238

d. Modul Aplikasi Pembacaan Laporan AL

Sistem pendukung proses akreditasi yang dimiliki BAN-PT untuk proses konvensional, pada awal tahun 2017 masih belum memiliki aplikasi untuk pembacaan laporan AL. Dalam hal ini, laporan AL diinput secara manual oleh staf sekretariat berdasarkan hard copy laporan yang disampaikan asesor. Metode seperti ini menjadikan proses input laporan asesor menjadi terlambat akibatnya proses revalidasi dan penetapan hasil akreditasi menjadi terhambat. Model aplikasi Pembacaan Laporan AL dikembangkan untuk membaca laporan asesor dalam bentuk soft copy (file excel). Dengan modul akurasi input data AL menjadi jauh lebih baik. Disamping itu, satu orang operator bisa melakukan input 30 laporan per hari (3 kali lebih cepat daripada input secara manual yaitu 10 laporan per hari).

e. Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan

Sistem aplikasi pengelolaan keuangan dikembangkan untuk membantu kelancaran dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan BANPT. Sistem ini dapat dihubungkan (interoperable) dengan system aplikasi pengelolaan APBN seperti SAS dan juga dapat dihubungkan dengan system aplikasi lain seperti SAPTO untuk memudahkan penyiapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan proses akreditasi. Selain itu, system ini juga dilengkapi dengan fungsi monitoring pelaksanaan RKAT dalam bentuk dashboard sehingga memudahkan bagi DE untuk memantau pelaksanaan kegiatan tahunan.

3. Sistem Informasi Akreditasi

Sistem informasi akreditasi berisi antara lain kegiatan BAN-PT, data usulan akreditasi, status akreditasi dan peringkat terakreditasi institusi dan program studi, dan usulan program studi baru. Semua informasi di atas tersaji dalam laman web <https://www.banpt.or.id>.

Pada periode ini, telah dilakukan penataan situs web BANPT. Situs www.banpt.or.id dijadikan sebagai satu-satunya website BANPT. BAN-PT secara resmi sudah meminta kepada otoritas nasional PANDI untuk menghapus/menutup semua situs yang terkait dengan BANPT selain situs resmi di atas.

Sepanjang tahun 2017, telah dikembangkan beberapa fitur baru di website www.banpt.or.id untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait akreditasi. Selain itu, juga telah dibuat sistem email resmi BANPT untuk semua pengguna email di lingkungan BANPT.

F. Peningkatan Kapasitas Sekretariat

Dalam rangka meningkatkan kemampuan staf Sekretariat BAN-PT dalam mengelola naskah dinas dan kearsipan berdasarkan Undang-Undang Kearsipan dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah dilakukan pelatihan system kearsipan bagi staf sekretariat.

Materi pelatihan yang diberikan meliputi:

- a. Penjelasan tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan MenRistekDikti dan penjelasan tentang PermenristekDikti Nomor 51 Tahun 2015 Tata Naskah Dinas di Lingkungan KemenristekDikti dan Latihan pengelolaan naskah dinas dan penerapan PermenRistekDikti Nomor 51 Tahun 2015.
- b. Penjelasan tentang UU Kearsipan, penetapan Jadwal Retensi Arsip dan latihan tata kelola kearsipan dan penetapan retensi arsip.

Staf sekretariat juga merupakan aktor penting dalam implementasi SAPTO. Karena itu pelatihan SAPTO untuk staf sekretariat telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan materi yang bersifat umum maupun materi yang bersifat spesifik sesuai tugas masing-masing staf.

V. Kendala dan Solusi/Strategi

Suasana dan lingkungan kerja yang kurang kondusif saat BANPT masih menempati kantor Kemdikbud di Cipete dapat teratasi sejak BANPT mendapat alokasi di Gedung BPPT2 Lt.17. Namun demikian, ditemukan persoalan baru, yaitu system pengelolaan gedung yang terpusat dan menerapkan kebijakan hemat energi, menyebabkan system pendingin dan penerangan ruangan hanya berfungsi hingga pukul 16.00. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kegiatan BANPT yang memiliki jam kerja hingga di atas jam 17.00. Upaya untuk mencari solusi terhadap persoalan ini melalui Sekretaris Jenderal Kemristekdikti telah dilakukan namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Hasil temuan audit BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2016 dan sebelumnya, telah menyebabkan system keuangan BANPT harus mengalami perubahan secara mendasar, dan berimplikasi pada besaran dan mekanisme pembayaran insentif untuk staff sekretariat dan asesor. Penurunan secara drastis pendapatan staff sekretariat tidak dapat dipungkiri telah menyebabkan turunnya semangat dan komitmen kerja staff. Upaya penyelesaian melalui pengajuan Satuan Biaya Masukan Lain (SBML) ke Kementerian Keuangan telah dilakukan, namun terkendala oleh tidak termuatnya Sekretariat BANPT dalam struktur organisasi Kementerian.

Sistem dan proses akreditasi yang selama ini bersifat manual telah menyebabkan sulitnya untuk memantau dan mengendalikan kualitas dan validitas proses. Banyak sekali ditemukan usulan akreditasi dari tahun-tahun sebelumnya yang prosesnya belum diselesaikan. Sementara itu, proses data entry hasil assessment bukan hanya menjadikan proses berjalan lambat, tapi juga sangat rentan terhadap kesalahan. Upaya perbaikan melalui pengembangan system aplikasi berbasis TIK telah dilakukan, yang tidak hanya ditujukan untuk peningkatan mutu dan efisiensi proses akreditasi (SAPTO), tapi juga system informasi public melalui website (www.banpt.or.id), system aplikasi keuangan, dan system aplikasi administrasi persuratan. Namun solusi dimaksud belum menyelesaikan proses yang masih tertunda dan belum ditemukan.

Sekretariat BAN-PT yang hanya merupakan kegiatan dari Direktorat Pembinaan Kelembagaan IPTEK Dikti, Ditjen Kelembagaan IPTEK Dikti, telah menyebabkan kelambanan dalam proses keuangan, karena akan sangat bergantung pada kelancaran proses di Ditjen Kelembagaan. Akibatnya terjadi tertundanya pelaksanaan sejumlah kegiatan, termasuk proses akreditasi. Pemotongan anggaran BANPT yang sangat signifikan sebagai dampak dari rendahnya daya

serap kegiatan lain di Ditjen Kelembagaan adalah contoh lain dari kerugian dari posisi secretariat BANPT yang tidak dijadikan sebagai satuan kerja tersendiri. Upaya untuk menjadikan Sekretariat BANPT sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian telah diwacanakan sejak akhir tahun 2016, namun belum dapat direalisasikan hingga saat ini.

Selain system IT dan governance, instrument dan assessor merupakan factor kunci dalam menentukan kualitas akreditasi secara keseluruhan. Instrument yang saat ini digunakan dirasakan masih sangat jauh dari harapan. Selain masih didominasi oleh aspek input, instrument dimaksud juga sangat mekanistik sehingga tidak memberi ruang yang cukup bagi asesor untuk menggunakan wisdom dan expert judgement dalam menentukan hasil assessment. Selain itu, kompetensi assessor khususnya dalam aspek penjaminan mutu dan pengembangan Pendidikan tinggi masih relative terbatas. Upaya perbaikan yang telah dilakukan adalah menyusun instrument baru dengan paradigm yang mengedepankan aspek proses, output dan outcome, dan mengurangi aspek penilaian yang bersifat mekanistik, serta menambah porsi aspek penilaian kualitatif yang didasari atas wisdom dan kepakaran asesor baik dalam hal keilmuan maupun dalam aspek pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Upaya peningkatan kompetensi asesor juga telah dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pemantauan kinerja, dan perekrutan asesor baru. Penyisihan asesor yang dipandang berkinerja buruk (weeding out) juga telah dilakukan.

Kompetensi, keterampilan, dan kesejahteraan staff secretariat yang selama ini kurang menjadi perhatian, telah berdampak pada rendahnya moral dan etos kerja di kalangan staff. Budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyelesaian tugas antara lain juga disebabkan kurangnya kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan di BANPT. Sementara itu, system imbal jasa yang tidak berbasis kinerja, juga telah menyebabkan tidak terjadinya stimulasi untuk meningkatkan kinerja staff. Upaya yang telah dilakukan antara lain memberikan pelatihan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pemberian insentif bagi staff yang memiliki kinerja baik. Namun, upaya terkait imbal jasa mengalami hambatan karena penggajian dan pengelolaan keuangan sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan IPTEK DIkti.

Sebagai institusi utama dalam pelaksanaan akreditasi, BANPT juga memerlukan pengakuan dari dunia internasional. Di lingkungan ASEAN, system akreditasi di Indonesia sudah relative lebih maju di banding negara lain. Partisipasi aktif BANPT di AQAN juga telah berdampak positive dalam pengakuan atas akreditasi perguruan tinggi di Indonesia oleh negara-negara anggota ASEAN. Di luar

ASEAN, BANPT masih perlu mendapatkan pengakuan lebih substantive. Upaya yang telah dilakukan antara lain menjalin kerjasama dengan QAA – UK, HEEACT – Taiwan, NIAD – Japan, dan proses external review oleh ENQA dengan menggunakan ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF).

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Asesor yang lolos seleksi tahun 2017

Lampiran 2. Laporan Studi Hasil Akreditasi

Lampiran 3. Laporan Studi hasil kepuasan *stake holders* BAN-PT

Lampiran 4. Dokumen laporan panel pelaksanaan *external review* BAN-PT

